

Kajian Penataan Bangunan Secara Ekologis di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng

Oleh:

Maryono *)

Abstrak: Kawasan Dieng merupakan salah satu kawasan di Jawa Tengah yang memiliki karakteristik unik. Di kawasan tersebut terdapat situs purbakala peninggalan budaya Hindu, disamping potensi alam seperti Danau/Telaga, air terjun, kawah dengan gas panas serta perbukitan hutan alam sebagai habitat satwa liar (elang jawa). Secara keseluruhan Kawasan Dieng yang berada pada ketinggian di atas 2000 m dpl tidak dimungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya karena kawasan ini merupakan kawasan lindung dan kawasan penyangga. Namun demikian kawasan Dieng berkembang tidak hanya sebagai kawasan lindung dan kawasan penyangga semata tetapi juga berkembang sebagai kawasan perkotaan di dataran tinggi. Untuk mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan lindung, diperlukan upaya penataan bangunan. Penataan bangunan diharapkan mampu mengontrol KDB dan KLB sehingga dapat mempertahankan fungsi lindung kawasan, disamping fungsi pelayanan dan wisata.

kata Kunci : Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ekologis, Kawasan Wisata Dieng

*) Staff Pengajar Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang

PENDAHULUAN

Kawasan Dieng merupakan salah satu kawasan di Jawa Tengah yang memiliki karakteristik unik. Di kawasan tersebut terdapat situs purbakala peninggalan budaya Hindu, disamping potensi alam seperti Danau/Telaga, air terjun, kawah dengan gas panas serta perbukitan hutan alam sebagai habitat satwa liar (elang jawa). Potensi kawasan tersebut menjadikan Kawasan Dieng berpotensi untuk cepat berkembang dan memiliki potensi besar sebagai Daerah Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).

Sebagai suatu wilayah, Kawasan Dataran Tinggi Dieng juga memiliki peran sebagai pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya. Di pusat kawasan terdapat fasilitas perekonomian seperti pertokoan, pasar. Fasilitas lain yang tersedia diantaranya adalah fasilitas penginapan, dan pelayanan kesehatan. Keberadaan fasilitas ekonomi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, menjadikan kawasan ini memiliki peran sebagai pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya.

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 14 tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah, dalam pengembangan perwilayahan pariwisata kawasan Dieng merupakan bagian dari pengembangan perwilayahan berdasarkan

koridor dan prioritas. Kawasan Dieng merupakan bagian dari koridor Semarang - Ambarawa - Wonosobo dengan pusat pengembangan di Semarang. Sedangkan dalam pengembangan perwilayahan berdasarkan prioritas, Dieng merupakan salah satu kawasan andalan pariwisata Propinsi Jawa Tengah.

Di sisi lain, perkembangan jumlah aktivitas penduduk yang terus meningkat dalam mengeksploitasi lahan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata terhadap kawasan Dieng. Hal tersebut tercermin dari jumlah wisatawan yang datang ke Kawasan Dieng. Kondisi tersebut jika tidak diantisipasi akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan secara khusus akan berdampak pada penurunan nilai ekonomis kawasan. Penurunan daya tarik wisata kawasan Dieng, a.l., dapat dilihat pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2002. Pada tahun 1990 jumlah wisatawan berkunjung mencapai 130.000 orang, tahun 2001 jumlah tersebut menyusut hingga 50% (sebesar 64.796 orang) dan tahun 2002 hanya mencapai kurang dari 50.000 wisatawan.

Arahan terhadap penataan bangunan secara ekologis di kawasan wisata dataran tinggi dieng dimaksudkan untuk memberikan rumusan dasar upaya pengembangan kawasan

Peran Rancang Kota dalam Pembangunan Berbasis Keadilan Sebuah Tinjauan Kritis Tentang Konsep Rancang Kota Berkelanjutan

Oleh:

Agung Sugiri^{*)} dan Fitri Yusman^{*)}

Abstrak: *Sebagai sebuah paradigma, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) agaknya telah dianut oleh semua negara di dunia sejak dua dekade terakhir ini. Sejak publikasi *The Limits to Growth* (Meadows et al. 1972) yang ditindaklanjuti laporan bertajuk *Our Common Future* (WCED 1987), wacana pembangunan mengalami perombakan yang luar biasa. Keadilan di dalam dan antar generasi (intra and intergenerational equity) menjadi prinsip utama yang harus dijamin, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan pula sebagai pembangunan berbasis keadilan (Sugiri, 2005). Para pakar dari berbagai disiplin ilmupun beramai-ramai mengajukan teori-teori “baru” yang umumnya berlabelkan ‘berkelanjutan’. Tapi apakah benar semua cabang ilmu yang berkaitan dengan pembangunan wilayah dan kota perlu diberi imbuhan ‘berkelanjutan’, hal ini seharusnya menjadi pertanyaan pertama yang harus dijawab. Makalah singkat ini membahas peran rancang kota (urban design) dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. Menggunakan kerangka pembangunan berbasis keadilan dalam suatu perekonomian dengan potensi utama sumberdaya alam, seperti Indonesia, tulisan ini melihat sumbangan prinsip-prinsip rancang kota di dalamnya. Ternyata apa yang selama ini menjadi persangkaan banyak orang, bahwa diperlukan konsep baru rancang kota berkelanjutan, tidak menemukan pembenarannya. Berbeda dengan teori ekonomi pembangunan yang memang memerlukan revisi dan pembaruan (Friedmann dan Weaver, 1979; Pearce, Barbier dan Markandya, 1990), prinsip-prinsip rancang kota pada umumnya telah bersesuaian dengan konsep pembangunan berkelanjutan sejak sebelum istilah berkelanjutan itu sendiri menjadi populer. Perancangan kota telah sejak lama berperan secara signifikan dalam mengatasi kegagalan keadilan (equity failures), setidaknya terlihat jelas pada tiga dari sembilan isu, yaitu akses buruk masyarakat kurang beruntung kepada fasilitas dan pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak efisien, dan eksternalitas negatif dari kegiatan ekonomi. Hal inipun menemukan bukti empirisnya, misalnya, melalui sumbangan rancang kota dalam mitigasi bencana di daerah Aceh. Tanpa embel-embel berkelanjutanpun rancang kota untuk mitigasi bencana di Aceh akan merupakan konsep rancang kota berkelanjutan. Dengan kata lain, rancang kota sebagai suatu cabang ilmu tidak memerlukan tambahan keterangan ‘berkelanjutan’.*

Kata kunci : rancang kota, pembangunan berkelanjutan, keadilan, mitigasi bencana

*) Staff Pengajar Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah menjadi paradigma pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sejak dua dekade belakangan ini. Dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan, yang terpicu pertama kali oleh *The Limits to Growth* (Meadows et al., 1972), sebagai sebuah konsep “baru” telah sangat berkembang, baik di dalam ranah akademik maupun praktis, tentu saja di tengah-tengah debat teoritis maupun praktikalnya. Tak kurang pula para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan cabang-cabangnya, terutama yang terkait dengan pembangunan, seperti manajemen pembangunan, perencanaan wilayah dan kota, arsitektur, dan rancang kota pun berusaha merumuskan teori-teori baru keberlanjutan di dalam disiplin ilmu masing-

masing. Munculah kemudian istilah-istilah baru seperti perencanaan wilayah berkelanjutan, manajemen prasarana berkelanjutan, dll. termasuk rancang kota berkelanjutan (*sustainable urban design*).

Mungkin benar bahwa banyak cabang ilmu yang harus menyesuaikan diri dengan arus keberlanjutan ini, namun satu pertanyaan cukup menggelitik untuk mendapatkan jawabannya: “Benarkah cabang ilmu perancangan kota perlu menempelkan imbuhan ‘berkelanjutan’ padanya?” Makalah singkat ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut melalui kajian literatur, yang diperkuat dengan kasus rancang kota untuk daerah rawan bencana di Aceh, yaitu di Kota Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie.

Optimalisasi Pemanfaatan Ruang dalam Pola Proses Argumentasi Kebijakan Penataan Kawasan (Kasus Studi Lapangan Pancasila di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)

Oleh:

Samsul Ma'rif

Abstrak: Lapangan Pancasila di kawasan Simpang Lima Kota Semarang sebagai landmark sekaligus pusat kota berkembang dalam proses dinamik oleh pertarungan menuju optimalisasi pemanfaatan ruang antara yang berorientasi privat dan orientasi publik. Orientasi privat menuju pada pencapaian pertumbuhan dengan motif-motif secara ekonomi, sedangkan orientasi publik menuju pada pencapaian pemerataan dengan motif-motif sosial/ekologis. Kebijakan pemerintah dalam menempatkan kawasan Simpang Lima berfungsi sebagai pusat aktivitas kota, berskala nasional, regional dan lokal menyebabkan kawasan ini menjadi magnet orientasi aktivitas kota secara keseluruhan karena semua komponen pelaku ekonomi kota mempunyai kepentingan dengan fungsi-fungsi dimaksud.

Berkaitan dengan upaya optimalisasi fungsi Lapangan Pancasila di kawasan Simpang Lima, diperlukan adanya alternatif kebijakan sebagai solusi. Secara jangka panjang selama kawasan tetap berfungsi publik sehingga setiap pelaku ekonomi ruang bebas untuk ikut serta maka pemecahan masalah ganda mengenai eksploitasi Lapangan Pancasila di kawasan Simpang Lima yang over di satu sisi dan kualitas ruang yang semakin menurun di sisi lainnya akan tetap ada. Upaya pemecahan masalahnya adalah terletak di luar kawasan itu sendiri, artinya perlu ada pengembangan sentra ruang alternatif baru atau tambahan pusat pertumbuhan bagi Kota Semarang.

LATAR BELAKANG

Pada masa kolonial Belanda, kawasan kota lama Semarang merupakan pusat kota. Dalam perkembangan, karena proses dekolonisasi dan manajemen pertumbuhan kota yang kurang berpihak menyebabkan kota lama berkembang stagnan. Kota lama sudah dianggap tidak menarik lagi karena tidak memberi dampak yang menguntungkan bagi insan pelaku ekonomi, sehingga mencari kawasan baru yang dianggap lebih menjanjikan. Pusat kota akhirnya bergeser ke kota baru di Jalan Pemuda, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran dan Simpang Lima.

Kawasan Simpang Lima saat ini merupakan landmark sekaligus pusat kota (CBD) Kota Semarang. Sebagai pusat kota, Simpang Lima merupakan magnet perekonomian kota Semarang, hal ini mengakibatkan banyak pihak yang berorientasi melakukan kegiatan ekonomi di wilayah sekitar kawasan ini, dengan asumsi bahwa kawasan ini memiliki daya tarik secara sosial maupun ekonomi dengan perannya tadi.

Pertumbuhan kawasan Simpang Lima sebagai akibat dari bergesernya peran kawasan kota lama tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal baik secara implisit

maupun eksplisit. Secara eksplisit faktor yang berperan adalah posisi strategis dekat dengan pemukiman, perkantoran pemerintahan dan pendidikan. Secara implisit faktor yang berperan adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ditunjang oleh kondisi fisik belum munculnya alternatif pusat aktivitas baru sebagai kompetitor.

Perkembangan kawasan Simpang Lima di atas pada akhirnya memunculkan fenomena *trade off* antara fungsi kawasan yang berorientasi budidaya dan berorientasi fungsi lindung. Bila disepakati bahwa definisi budidaya secara mutlak diarahkan pada kepentingan yang berorientasi privat, maka definisi lindung mengarah pada kepentingan publik. Perbedaan orientasi antara kepentingan privat dan publik dilatarbelakangi oleh substansi yang menunjang dibelakangnya. Orientasi privat adalah pada pencapaian pertumbuhan dengan motif-motif secara ekonomi, sedangkan orientasi publik adalah pada pencapaian pemerataan dengan motif-motif sosial.

Pertarungan kepentingan antara orientasi privat dan orientasi publik pada hakikatnya adalah dalam kerangka memaksimalkan utilitas masing-masing pihak yang ikut berkompetisi di dalam ruang kawasan Simpang Lima. Berkaitan dengan pencapaian

Pengaruh Modal Sosial Terhadap Pertalian Usaha Klaster Pariwisata Borobudur¹

Oleh:

Rudiansyah*) dan Holi Bina Wijaya**)

Abstrak: *The collective action in cluster production process is an important key for the success of Borobudur Tourism Cluster. By carry out the collective action (collective cooperative), tourism cluster can increase collective capacity and relationship among stakeholders activities. The strength of collective action or trade relationship depend on the type and the use of social network on cluster. In this case, social capital is focused on social network, it identifies the interactions formed and the influence of social capital toward relationship trade of Borobudur Tourism Cluster.*

This paper shows the influence of social capital in the context of Borobudur Tourism Cluster toward relationship trade are consist of friendship, family relationship, organization relationship. In the cluster activities, it tends to be negative due to the trade units of the cluster do not have yet a strong relation each other. The local dialogue forum is still in initiation stage, and the cooperation on it does not reeach yet at an operational level.

Exclusiveness bonding may give a negative impact in social capital in cluster, due to the relation tend to closed and limited to few stakeholders. The relationship based on friendship and organizational relation need to be encouraged in open way and positif support to the production activities.

Kata Kunci : *cluster, social network, relationship trade*

*) Staf Pengajar Jurusan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta

LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi yang berimbas pada krisis multi sektoral yang melanda Indonesia dan beberapa negara lain pada awal tahun 1998 merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi perkembangan bangsa ini. Pada masa itu yang menjadi penyelamat justru dari sektor-sektor yang berbasis pada potensi lokal seperti industri kecil. Walaupun sisa-sisa dari krisis tersebut masih ada namun, pengalaman tersebut memberikan pembelajaran yang mengarahkan pemerintahan sekarang untuk lebih giat mengembangkan sektor-sektor usaha yang berbasis pada potensi lokal. Dalam upaya tersebut, kerja dari pemerintah tidak akan maksimal apabila tidak ada partisipasi dari masyarakat secara aktif, untuk itu metode yang paling sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan pembentukan klaster-klaster usaha.

Klaster merupakan suatu kelompok usaha terdekat yang berhubungan secara geografis. dimana pemusatan geografis industri terkait tersebut diikuti dengan pemusatan aktivitas dan lembaga pendukung usaha (JICA, 2004). Klaster dalam penerapannya telah

memberikan andil yang besar dalam mendorong perekonomian lokal maupun regional. Hal ini membuktikan bahwa klaster usaha mampu membentuk suatu kegiatan kolektif sehingga tercipta efisiensi usaha dalam klaster tersebut yang selanjutnya akan memberikan keuntungan, nilai tambah, dan peningkatan kemampuan kompetensi perekonomian yang lebih baik.

Dalam kaitannya terhadap pembangunan sosial ekonomi, penguatan klaster usaha menjadi sangat penting untuk membentuk suatu klaster yang dinamis. Penguatan klaster tersebut dapat dilakukan melalui penguatan modal sosial (*social capital*) dan juga dapat melalui penguatan pertalian usaha dalam klaster tersebut. Dalam hal ini akan dilihat pengaruh modal sosial terhadap pertalian usaha yang mengkaji karakteristik modal sosial pada klaster yang difokuskan terhadap jaringan yang terbentuk pada klaster pariwisata, dan ini merupakan suatu tindakan bersama oleh para pelaku usaha.

Modal sosial yang melekat pada interaksi diantara para pelaku usaha diyakini sangat penting untuk membentuk pertalian usaha

¹ *Tulisan ini adalah salah satu hasil penelitian klaster usaha yang dilakukan melalui Program Hibah Kompetisi A2 Departemen Pendidikan Nasional pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.*

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata

Oleh:

Rina Kurniati

Abstrak: *Ekowisata adalah salah satu bentuk pariwisata berkelanjutan, dimana ada 3 (tiga) komponen penting didalamnya yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan ekowisata itu sendiri. Komponen yang ditinjau dalam hal ini adalah kondisi objek wisata, karakteristik masyarakat, serta kelembagaan dalam masyarakat. Dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian melalui partisipasi masyarakat sangat penting, karena selain untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang, juga karena masyarakat mulai merasakan dampak positif keberadaan ekowisata. Hal ini ditandai dengan mata pencaharian masyarakat yang meningkat di sektor kepariwisataan, sekalipun tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Kelembagaan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat mulai berkembang dan terdapat lembaga kolaborasi para pemangku kepentingan yang merupakan wadah bersama dalam pengelolaan ekowisata. Sedangkan beberapa arahan peningkatan partisipasi masyarakat adalah pembatasan jumlah pengunjung, regulasi terhadap aktivitas pariwisata, rehabilitasi terhadap objek wisata, penyediaan dan peningkatan angkutan wisata, peningkatan serapan tenaga kerja sektor pariwisata, penyadartahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat.*

Kata kunci : Partisipasi masyarakat, pengembangan ekowisata

PENDAHULUAN

Alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kekayaan sangat beragam. Keberadaan kekayaan alam ini dimaksudkan agar manusia dapat mengelolanya bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Manusia sebagai pengelola alam terkadang hanya mementingkan pemenuhan kebutuhan hidupnya tanpa mempertimbangkan kelestarian alam sehingga terjadi ketidakseimbangan alam yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan yang merugikan manusia itu sendiri baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan pada akhirnya keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki tidak akan terpenuhi.

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, ekowisata merupakan salah satu bentuk pengembangannya. Konsep pengembangan pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip ekowisata akan sangat menjamin kelestarian sumber daya pariwisata dan masyarakatnya. Pada prinsipnya terdapat 3 (tiga) aspek pokok ekowisata yaitu manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi (Fandeli dan Nurdin, 2005:8; Damanik dan Weber, 2006:42).

Namun berbagai persoalan muncul ketika pengelolaan tidak maksimal. Masyarakat

seringkali tidak mendapat tempat yang tepat, padahal sudah seharusnya masyarakat mendapat perhatian karena tanpa dukungan dari masyarakat maka bentuk pengembangan yang dilakukan tidak akan berjalan sesuai harapan. Paradigma pembangunan berbasis partisipasi masyarakat merupakan paradigma pembangunan yang langsung menyentuh ke lapisan bawah yang bersentuhan langsung dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembangunan yang tidak berbasis masyarakat hanya akan menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaannya (Fandeli dan Nurdin, 2005:108). Suasana yang kondusif sangat diperlukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, yaitu situasi yang menggerakkan masyarakat untuk menaruh perhatian dan kepedulian pada kegiatan ekowisata dan kesediaan untuk bekerjasama secara aktif dan berlanjut (Damanik dan Weber, 2006:106).

Degradasi mutu ekosistem dan ancaman-ancaman perusakan masih mewarnai keberadaan potensi dunia ini. Salah satu aktivitas yang menjadi ancaman kelestarian kawasan tersebut diantaranya adalah adanya penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan racun sianida, ancaman pengrusakan terumbu karang oleh jangkar kapal laut, eksploitasi karang dan pasir untuk tujuan komersial, dan penebangan pohon bakau, pembangunan fasilitas pariwisata yang

Keberlanjutan Komunitas di *Unsustain Area* (Studi Kasus : Kelurahan Bandarharjo, Semarang)

Oleh:

Santy Paulla Dewi, ST, MT *)

Abstrak : *Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Pada saat ini pemerintah belum mampu menyediakan perumahan yang layak huni untuk semua masyarakat. Pada akhirnya karena tidak mampu, masyarakat tinggal di wilayah-wilayah yang dirasa tidak layak bahkan tidak sustain. Salah satunya adalah Bandarharjo, dimana terjadi land subsidence, banjir dan rob. Namun demikian masyarakat masih bertahan dan menolak pindah ke rusunawa yang disediakan pemerintah. Dengan demikian perlu diketahui korelasi antara permasalahan fisik yang terjadi dengan keberlanjutan komunitas masyarakat. Berdasarkan analisa diketahui bahwa amblesan tanah, banjir dan rob memiliki korelasi yang kuat terhadap jumlah rumah yang diperbaiki dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan. Untuk menghindari agar tidak terus ambles dan tidak tergenang banjir dan rob, maka masyarakat meninggikan rumahnya. Namun demikian hal ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saja. Partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan cukup tinggi namun lebih pada program yang dilakukan secara swadaya. Sedangkan program yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat cenderung pasif. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa komunitas masyarakat akan terus bertahan di Bandarharjo meski terjadi amblesan tanah, banjir dan rob. Mereka justru menyikapi permasalahan fisik ini dengan adaptasi terhadap masalah. Seperti meninggikan rumah dan adanya kebiasaan masyarakat meletakkan barang-barang berharganya ditempat yang lebih tinggi meski belum terjadi banjir. Keberlanjutan komunitas di Bandarharjo ini juga diindikasikan dengan bertambahnya luas wilayah terbangun, banyaknya rumah yang diperbaiki serta hubungan kekerabatan yang kuat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat serta rasa solidaritas bertahan yang kuat.*

Kata Kunci : keberlanjutan, komunitas masyarakat, *unsustain area*

*) Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT Undip

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan kota saat ini menjadi tujuan dari semua proses perencanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Kota dengan berbagai fungsi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan kota yang hanya memiliki satu fungsi (Emil Salim, 2004). Pertumbuhan dan perkembangan kota yang relatif cepat ini tidak diimbangi dengan kecepatan dalam hal penyediaan sarana prasarana penunjang kota. Salah satunya adalah penyediaan perumahan di perkotaan. Hal ini tampak dari munculnya kantong-kantong pemukiman kumuh di kota-kota yang sedang tumbuh dan berkembang. Kondisi ini diperparah dengan semakin meningkatnya aliran migrasi penduduk dari desa ke kota.

Keterbatasan dan peningkatan harga lahan di pusat kota semakin mendesak perkembangan penyediaan perumahan di pinggiran kota (Yudo Husodo, 1991). Tingginya permintaan akan rumah pada

akhirnya akan membuat masyarakat mengesampingkan faktor-faktor penting yang seharusnya dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi rumah. Salah satunya adalah faktor fisik alam.

Fenomena ini salah satunya dapat dijumpai di Kelurahan Bandarharjo, Semarang. Wilayah ini termasuk sebagai salah satu wilayah pinggiran kota Semarang yang berkembang dengan memiliki berbagai fungsi seperti industri, pemukiman dan transportasi. Meski berkembang dengan berbagai fungsi aktivitas, namun Bandarharjo termasuk salah satu kawasan kumuh di Kota Semarang. Kekumuhan tersebut ditunjukkan dengan tingginya kepadatan bangunan, lingkungan yang tidak dilengkapi dengan jaringan sanitasi dan drainase hingga fisik rumah yang tergolong rumah tidak sehat (sempit, pengap, kurang ventilasi dan sirkulasi).

Di sisi lain terdapat permasalahan fisik alam yang membuat Bandarharjo termasuk dalam *unsustain area* untuk dijadikan sebagai area pemukiman. Hal ini dikarenakan

Dukungan Kebijakan Dalam Menciptakan Kota Berkelanjutan

Oleh:

Artiningsih *)

Abstrak: *Bagaimana menjawab tantangan mewujudkan kota yang berkelanjutan adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji. Hal ini mengingat pembangunan adalah implementasi dari perencanaan, dan pembangunan dikatakan berkelanjutan jika produk perencanaan tata ruangnya disusun dengan pertimbangan ekologi, ekonomi dan keadilan sosial (equity). Idealnya, kebijakan pembangunan yang diambil, baik dalam lingkup nasional, regional maupun lokal, seharusnya saling terkait dan berkesinambungan. Namun pada kenyataannya seringkali kebijakan di tiap level pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Tulisan ini akan menelaah lebih jauh berbagai preskripsi pembangunan berkelanjutan dan area kebijakan yang dipengaruhi.*

Kata Kunci : kebijakan, kota ekologis, pembangunan berkelanjutan, strategi perencanaan

*) Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah digaungkan oleh banyak pihak. Namun perwujudannya dalam lingkup regional hingga lokal belumlah optimal.

Permasalahan yang mengemuka adalah tentang penjabaran kebijakan level nasional ke regional, hingga lokal ke dalam tahapan-tahapan pembangunan, sehingga perencanaan dan pembangunan dapat dilakukan tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berhenti pada tingkatan visi dan misi saja, namun juga perlu penajaman pada kebijakan di level bawahnya hingga sampai pada kebijakan lokalnya dan terutama pada tahap atau tingkatan implementasi.

Upaya menciptakan kota berkelanjutan melalui berbagai preskripsi perencanaan tata ruang seringkali masih bersifat normatif. Ketika diambil satu kebijakan di level nasional tentang pentingnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah misalnya, maka adalah penting untuk juga menetapkan beberapa tahapan pembangunan agar tujuan pelibatan masyarakat tercapai. Bagaimana upaya peningkatan kepedulian masyarakat, juga para pemangku kepentingan lainnya dilakukan. Bagaimana upaya perubahan persepsi, preferensi hingga perilaku masyarakat yang lebih pro lingkungan dapat didorong, diintensifkan dan ditingkatkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah perlu orientasi target atau cukup dengan menyandarkan pada trend

yang terjadi? Sementara itu, keberhasilan pembangunan, dalam hal ini misalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, banyak ditentukan oleh perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan lain di tingkat akar rumput.

Oleh karenanya dukungan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait pada integrasi antar level kebijakan dari regional hingga lokal dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan menjadi penting.

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Banyak alternatif upaya mewujudkan kota berkelanjutan ditawarkan oleh berbagai pakar. Preskripsi yang dikemukakan dapat dibagi ke dalam beberapa lingkup, antara lain yang menyangkut bentuk kota, lingkungan alamiah, transportasi, pengelolaan air, energi dan sampah, kebutuhan dan peranserta masyarakat serta skema pengambilan keputusan.

Kenworthy (2006:68-69) mengemukakan tentang 10 dimensi kritis eco-city, yang dapat disebut juga sebagai kriteria-kriteria kota berkelanjutan, yaitu:

(1) Kota berkelanjutan akan memiliki bentuk kota yang kompak, dengan penggunaan lahan campuran yang efisien, sehingga mampu melindungi lingkungan alamiahnya, keanekaragaman hayati dan keberadaan lahan pertanian. (2) Kota diisi dan dikelilingi

Paradigma Kota Kompak dalam Menjaga Keberlanjutan Iklim Mikro Kota

Oleh:

Wakhidah Kurniawati *)

Abstrak: *Isu kota kompak saat ini menjadi salah satu solusi untuk keberlanjutan kota. Ide ini diadopsi oleh banyak kota di dunia, terutama di negara-negara maju. Ide kota kompak ini pada awalnya adalah sebuah respon dari pembangunan kota acak (urban sprawl development). Kota kompak akan menjadikan kota lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi, perlindungan pada daerah peri-peri dan daerah hijau, dan akses yang lebih baik kepada fasilitas dan layanan kota. Efisiensi bahan bakar dan penggunaan ruang, tidak hanya membawa dampak pada penghematan biaya, waktu dan ruang, tetapi juga membawa perubahan terhadap dampak iklim mikro kota. Kota yang tadinya boros dengan penggunaan energi untuk tiap bangunan dan peruntukan ruang, akan lebih sustain dengan akses langsung perubahan musim dan perubahan cahaya. Desain bangunan dan konstruksi bangunan yang ada akan mengontrol transmisi panas kawasan. Pada skala kota, ruang antar bangunan merupakan elemen penting untuk mengatur pergerakan udara, sinar matahari, dan juga ketersediaan sumber energi alami pada fasade bangunan. Desain ruang kota juga akan membantu mengontrol polusi dan kondisi panas. Best practice dari Hongkong dan Singapura akan memberi pemahaman lebih mengenai keuntungan kota kompak ini terhadap keberlanjutan iklim mikro kota. Akan tetapi, kesuksesan apapun implementasi kota kompak di negara-negara maju, tidak bisa serta merta kita adopsi mentah-mentah. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan mengingat perbedaan iklim di beberapa negara. Penerapan di warm humid climate tentu berbeda dengan di hot dry climate. Bagaimanapun, hal terpenting yang harus dilihat adalah : ide ini tidak bisa secara instan diterapkan tanpa melihat kasus per kasus permasalahan yang dihadapi oleh sebuah kota, di samping keharusan penyesuaian terhadap karakter kota.*

Kata Kunci : kota kompak, keberlanjutan, iklim mikro kota

*) Staf Pengajar Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

Sustainability (keberlanjutan) suatu kota, merupakan isu penting saat ini. Sustainability merupakan alat untuk membentuk dasar dari suatu kota dan kebijakan untuk menciptakan bentuk kota yang berkelanjutan. Menurut Kostof (1991) dalam Newman dan Kenworthy (1999), selama ini ada 3 kekuatan yang memberi pengaruh terhadap bentuk kota, yaitu: transportasi, ekonomi, dan budaya. Ketiganya bisa memberi pengaruh, terhadap keberlanjutan atau ketidakberlanjutan bentuk kota.

Salah satu bentuk kota yang direkomendasikan untuk keberlanjutan adalah kota kompak. Kota kompak (*compact city strategy*) dipandang sebagai alternatif utama ide pengimplementasian pembangunan berkelanjutan dalam sebuah kota. Ide kota kompak ini merupakan solusi dari pembangunan kota acak (*urban sprawl development* [Jenks, et al dalam Roychansyah, 2006]). Ide ini juga diharapkan akan menjadi solusi bagi efisiensi energi

kota. Kota akan lebih hemat dalam bahan bakar dan penggunaan ruang dengan adanya pengaturan kota kompak ini. Akan tetapi, apakah ide ini hanya memberi pengaruh pada efisiensi ruang dan energi saja? Bagaimana pengaruhnya terhadap iklim mikro setempat? Apakah berkorelasi positif atau negatif? Hal inilah yang akan dibahas dalam makalah ini.

KOTA KOMPAK SEBAGAI SOLUSI KEBERLANJUTAN KOTA

Sejarah kota dimulai dari walking city. Antara tahun 10.000 dan 7.000 tahun yang lalu, kota-kota awal berada di Timur Tengah. Sejak periode tersebut sampai dengan pertengahan abad 19, bentuk kota dimanapun berdasar pada pejalan kaki. Karakteristik 'tradisional walking city' ditandai oleh kepadatan tinggi (100-200 orang/ha), fungsi lahan campuran, jalan-jalan sempit, dan bentuk kota organik. Di *walking city*, semua tempat bisa dicapai dengan berjalan kaki kurang lebih setengah jam.

Menciptakan Kota yang Berkelanjutan melalui Efisiensi Pola Pergerakan

Oleh:

Diah Intan Kusumo Dewi*)

Abstrak: Efisiensi pola pergerakan merupakan salah satu langkah yang perlu diambil dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Kajian mengenai efisiensi ini merupakan implementasi dari pembangunan dan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Akan tetapi kenyataan dilapangan implementasi kota yang berkelanjutan sangat sulit dilakukan, karena tidak adanya keterkaitan dan kesinambungan antara semua aspek yang terkait dalam pembangunan kota. Oleh karena itu bagaimana menciptakan efisiensi pola pergerakan adalah hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Kata Kunci : efisiensi, *urban travel cost*, *urban mobility*, kota yang berkelanjutan

*) Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota UNDIP

PENDAHULUAN

Konsep kota berkelanjutan seringkali dikaitkan dengan kata efisiensi. Namun perwujudannya dalam perencanaan dan pembangunan kota belumlah optimal terutama yang menyangkut aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Selain itu efisiensi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan seringkali juga dikaitkan dalam pembangunan *compact city*. Konsep *compact city* mempunyai tujuan untuk mengurangi jarak perjalanan terutama yang menggunakan mobil dengan mendukung perjalanan yang menggunakan kendaraan umum, sepeda dan berjalan kaki. (Williams, 2005:21)

Permasalahan yang timbul dalam penerapan konsep ini adanya gejala pertumbuhan kota tak terkendali akibat proses over urbanisasi yang terjadi menyebabkan munculnya kawasan pinggiran yang sering disebut sub-urban. Daerah sub-urban adalah perkembangan desa atau daerah pinggiran kota menjadi kota yang terjadi oleh ekstensi atau penjalaran kota, yang sering dikenal sebagai perkembangan pinggiran kota dan merupakan pembentukan kota metropolitan, konurbasi hingga ke kota wilayah (Soetomo, 2002:7).

Dengan demikian gejala ekstensi perkotaan tersebut menyebabkan munculnya ketergantungan wilayah tersebut terhadap kota induk sehingga akan mempengaruhi pola pergerakan penduduk kawasan pinggiran kota. Pola pergerakan penduduk ini secara tidak langsung akan mempengaruhi biaya perjalanan penduduk suatu kota. Makin

tingginya pola pergerakan penduduk makin besar biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh penduduk kota tersebut.

PERKEMBANGAN KOTA SECARA MENYEBAR (URBAN SPRAWL)

Proses perkembangan kota secara fisik dapat dilihat dari penambahan jumlah penduduknya. Pertambahan penduduk ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal maupun untuk aktivitas lainnya sehingga pusat kota tidak menyediakan lagi lahan yang cukup dengan harga yang murah. Akibatnya masyarakat beralih dengan bertempat tinggal dipinggiran kota. Perkembangan kota yang menjalar ke pinggiran kota inilah yang sering disebut sprawl, yang secara dapat diamati dalam jarak perjalanan yang ditempuh antara daerah pinggiran dengan pusat kota.

Dampak dari perkembangan kota tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; Pertumbuhan penduduk, Peningkatan pelayanan transportasi kota, Meningkatnya taraf hidup masyarakat, Gerakan pendirian rumah oleh masyarakat, serta adanya Dorongan/hakekat manusia sendiri yang menginginkan suatu rumah yang menjamin ketenangan pribadi, sehingga memilih daerah pinggiran yang jauh dari keramaian oleh Whyne-Hammond (dalam Dadjoeni, 1998).

Sprawl digambarkan lebih detail sebagai proses perkembangan kota dengan pemukiman yang menyebar dengan kepadatan rendah, perkembangan industri dan komersial, memiliki dampak sosial dan